



**KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PADA APBD DI
PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKABUMI
(Periode 2008 –2012)**

Skripsi

Disusun Oleh :
Indriyana
022110155

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

**JULI
2014**

**KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PADA APBD DI
PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKABUMI
(Periode 2008 –2012)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ketua Jurusan,

(Prof., Dr. Eddy Mulyadi Supardi, MM.,SE.,Ak.,CFr.A.,CA.)

(Dr. Yohanes Indrayono, MM.,SE.,Ak.)

**KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PADA APBD DI
PEMERINTAHAN KABUPATEN SUKABUMI
(Periode 2008 –2012)**

Skripsi
Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Sabtu Tanggal :19 Juli 2014

Indriyana

022110155

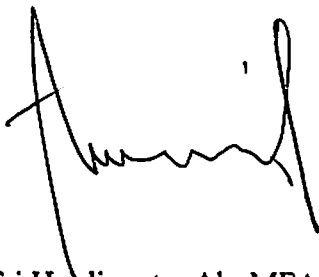
Menyetujui,

Dosen Penilai,



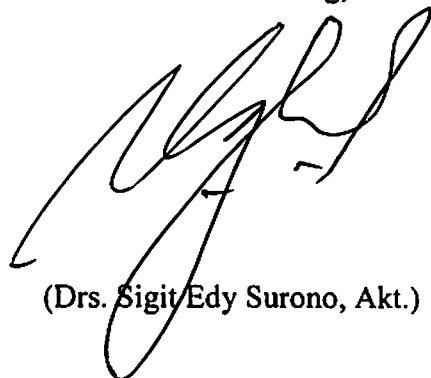
(Fajariah Mahruzar, MM.,Dra.,Ak.)

Pembimbing,



(Arif Tri Hardiyanto, Ak.,MFA.,CMA.,CCSA.,CA.)

Co Pembimbing,



(Drs. Sigit/Edy Surono, Akt.)

ABSTRAK

INDRIYANA. NPM 022110155. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Daerah Pada APBD di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi periode 2008-2012. Dibawah bimbingan: ARIF TRI HARDIYANTO dan SIGIT EDY SURONO.

masih kecilnya dana yang didapatkan dari PAD sehingga Belum memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan Kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Daerah. jika PAD yang diterima menurun maka DAU yang akan diterima akan meningkat, apabila sebaliknya PAD yang diterima meningkat maka DAU yang diterima akan menurun. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukabumi harus lebih mengembangkan potensi Pendapatan Daerah, sehingga PAD akan lebih meningkat.

Penelitian ini menggunakan data yang didapat dari Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi dan Badan Pusat Statistik Kota Bogor Tahun 2008-2012, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukabumi.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya kontribusi/sumbangan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah. Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis berusaha untuk memecahkan masalah-masalah melalui data-data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut.. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Uji F test antara Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa nilai F hitung (60.610) > F tabel (4,10), pada tingkat signifikansi sebesar 0,000 dibawah tingkat signifikansi 0,05 (0,000<0,05), bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Daerah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah pada APBD di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi (Periode 2008 – 2012)". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih atas terselesaikannya skripsi ini kepada semua pihak, terutama yang telah membantu dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof., Dr. Eddy Mulyadi Supardi, MM., SE., Ak., CFr.A., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
2. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Arif Tri Hardiyanto, Ak., MFA., CMA., CCSA., CA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini serta telah memberikan banyak masukan kepada saya.
5. Bapak Sigit Edy Suroho, Drs., Akt., selaku Co pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini serta telah memberikan banyak masukan kepada saya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan terima kasih atas segala Ilmu dan Pengetahuan selama penulis mengikuti kegiatan pendidikan di Universitas Pakuan Bogor.
7. Seluruh Staff Tata Usaha dan pelaksana Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan bantuan dan informasi dalam menunjang kegiatan perkuliahan.

8. Kedua orang tua tercinta, tanpa kalian penulis bukan apa-apa. Terimakasih untuk semua yang telah kalian berdua berikan baik dari segi materi maupun moral, kasih sayang, kesabaran yang tak terhingga.
9. Keluarga besar tercinta terima kasih untuk do'a dan dukungannya.
10. Sahabat-sahabat konsentrasi Akuntansi Sektor Publik : Mba Urie, Yanti, Ina, Lisna, Koprak, Adit, dan Idol yang sudah membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.
11. Teman-teman angkatan 2010 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
12. Teman-teman Organisasi UKM Seni dan Budaya, BEM UNPAK yang Memberi dukungannya.
13. Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah menyediakan wifi dan tempat yang nyaman.
14. DPPKD Kabupaten Sukabumi, BPS Kabupaten Sukabumi dan BPS Kota Bogor yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang mendukung untuk penyusunan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih untuk do'a dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Bogor, Juli 2014

Indriyana

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah	6
1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Kerangka Pemikiran	9
1.5 Paradigma Penelitian	12
1.6 Hipotesis Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pendapatan Daerah	14
2.2 Pendapatan Asli Daerah	18
2.2.1 Pajak Daerah	20
2.2.2 Retribusi Daerah	21
2.2.3 Hasil Pengelolaah Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	23
2.2.4 Lain-lain PAD yang sah	25
2.3 Dana Alokas Umum	26
2.3.1 Tahap Penghitungan DAU	27
2.4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	28
2.4.1 Fungsi-fungsi APBD	30
2.4.2 Prinsip-prinsip Anggaran Daerah	31
2.4.3 Struktur APBD.....	32
2.4.4 Penyusunan APBD	34
2.4.4.1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah	36
2.4.4.2 Kebijakan Umum APBD	37
2.4.4.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	38
2.4.4.4 Penyusunan Rencana Kerja Dan anggaran SKPD	40
2.4.4.5 Rencana Perda APBD	42
2.4.4.6 Perda APBD	45

2.5	Kontribusi PAD dan Dau terhadap Pendapatan Daerah	46
2.6	Penelitian Terdahulu	47
BAB III	OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1	Objek Penelitian.....	49
3.2	Metode Penelitian	51
3.2.1	Desain Penelitian.....	51
3.2.2	Oprasionalisasi Variabel	52
3.2.3	Metode Penarika Sampel.....	54
3.2.4	Prosedur Pengumpulan Data	54
3.2.5	Metode Analisis.....	55
3.2.5.1	Uji Asumsi Klasik	55
3.2.5.2	Uji Hipotesis	57
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Penelitian	61
4.1.1	Sejarah Singkat	61
4.1.2	Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi	65
4.1.3	Geografis Kabupaten Sukabumi	66
4.1.4	Sumber Daya Alam Kabupaten Sukabumi	67
4.1.5	Kondisi Perekonomian Kabupaten Sukabumi	68
4.1.6	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	71
4.1.7	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kab.Sukabumi	72
4.2	Pembahasan	73
4.2.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif	73
4.2.2	Asumsi Klasik	78
4.2.2.1	Uji Normalitas	78
4.2.2.2	Uji Multikolinearitas	80
4.2.2.3	Uji Autokorelasi	81
4.2.2.4	Uji Heteroskedastisitas	82
4.2.3	Pengujian Hipotesis	83
4.2.3.1	Analisis Regresi Linier Berganda	83
4.2.3.1	Uji Statistik t	85
4.2.3.3	Uji Statistik F	86
4.2.3.4	Uji Koefisien Korelasi (R)	87
4.2.3.5	Uji Koefisien Determinasi (<i>R-square</i>)	88
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Saran	91

JADWAL PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Realisasi Penerimaan Pemerintah Kab. Sukabumi	4
Tabel 2	: Sumbangan PAD, DAU terhadap APBD Kab.Sukabumi	6
Tabel 3	: Penelitian Terdahulu	47
Tabel 4	: Operasionalisasi Variabel.....	53
Tabel 5	: Model Summary.....	60
Tabel 6	: Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sukabumi	70
Tabel 7	: Hasil Statistik Deskriptif	73
Tabel 8	: Realisasi Penerimaan PAD, DAU dan Pendapatan Daerah pada Pemerintahan Kab. Sukabumi 2003-2012	72
Tabel 9	: Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov	78
Tabel 10	: Hasil Uji Multikolinearitas	80
Tabel 11	: Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson	81
Tabel 12	: Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas	82
Tabel 13	: Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	84
Tabel 14	: Hasil Uji t (Uji Partial)	85
Tabel 15	: ANOVA untuk Uji f	88
Tabel 16	: Hasil Uji Koefisien Korelasi	88
Tabel 17	: Hasil Uji Koefisien Determinasi	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Paradigma Penelitian	12
Gambar 2 : Tahap penyusunan APBD	34
Gambar 3 : Grafik Tingkat Penerimaan PAD Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Periode 2003-2012	75
Gambar 4 : Grafik Tingkat Penerimaan DAU Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Periode 2003-2012	76
Gambar 5 : Grafik Tingkat Penerimaan Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Periode 2003-2012	77
Gambar 6 : Grafik Normalitas	79
Gambar 7 : Grafik Heteroskedastisitas	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi
- Lampiran 2 : Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Sukabumi Periode 2008 – 2012 (Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa barat)
- Lampiran 3 : Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Sukabumi Periode 2004 - 2007 (Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa barat)
- Lampiran 4 : Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Sukabumi Periode 2003 (Sumber : situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia)
- Lampiran 5 : Titik erseptase distribusi t
- Lampiran 6 : Titik erseptase distribusi f

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali potensi daerahnya dan menetapkan prioritas pembangunan. Tujuan dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yaitu mendorong demokratisasi di daerah, mencegah disintegrasi bangsa, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah, memajukan dan meningkatkan daya saing daerah, mendekatkan pelayanan kepada publik, dan memberdayakan masyarakat.

Daerah memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran-pengeluaran daerah tersebut mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada dasarnya semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD akan menunjukkan bahwa semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, sebaliknya semakin kecil kontribusi PAD terhadap APBD akan menunjukkan bahwa semakin besar ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Satu hal yang perlu diingat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus mencari dan membuat pajak baru, tetapi lebih upaya memanfaatkan penerimaan pajak daerah secara optimal dan mengurangi kebocoran penerimaan pajak daerah. Dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka pembangunan daerah, termasuk daerah terbelakang dapat lebih digerakkan karena ada wewenang yang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan lebih tergali. Selain itu, setiap wilayah juga diberikan dalam bentuk "*Block Grant*" berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan demikian diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan

secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah.

Menurut Suparmoko (2002) untuk meningkatkan pendapatan daerah dewasa ini masing-masing daerah dituntut harus mampu berusaha untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalan potensi ekonomi daerah dan penggunaan potensi yang tepat adalah jalan yang terbaik, karena tanpa memperhitungkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta tanpa pengembangan pembangunan dan pendapatan daerah tidak akan mencapai hasil yang optimal atau sesuai yang diharapkan. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat dan juga dapat menolong perekonomian secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkelanjutan.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Pada tahun
2008-2012 (dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis penerimaan	2008	2009	2010	2011	2012
A.	Pendapatan Daerah	1,222,160	1,432,336	1,519,732	1,856,087	1,802,566
1	Pendapatan Asli Daerah	87,402	80,616	98,439	151,825	163,476
1.1	Pajak Daerah	13,596	14,681	15,482	68,498	67,735
1.2	Retribusi daerah	44,617	46.766	35,589	33,270	19,299
1.3	Hasil Perusahaan milik daerah & pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5,852	4,685	6,271	55,199	6,090
1.4	Lain-lain PAD yang sah	23,335	14,481	41,096	44,857	70,352
2	Dana Perimbangan	1,005,322	1,142,458	1,109,743	1,249,793	1,430,090
2.1	Bagi Hasil Pajak, Bukan Pajak, SDA	81,422	181,645	141,478	162,869	108,181
2.2	Dana Alokasi Umum	827,153	855,787	871,927	971,457	1,193,642

2.3	Dana alokasi Khusus	96,746	105,026	95,938	115,466	128,266
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	129,436	209,261	311,548	454,468	208,998
B	Pembiayaan Daerah	102,660	120,315	230,781	127,505	79,650
	Jumlah	1,324,821	1,552,651	1,750,513	1,983,592	1,882,216

Sumber Data : Statistik keuangan Provinsi Jawa Barat 2008-2012 (di olah penulis)

Dalam Hal tersebut bisa terlihat bahwa PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan dari pusat yang mendominasi Pendapatan Daerah pada APBD, walaupun PAD dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan tetap saja belum bisa melakukan kontribusi pembangunan dalam pembelanjaan yang selalu mengandalkan dari dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) di kabupaten Sukabumi. Sedangkan peran pemerintah di dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran tujuan pembangunan yang akan dicapai, yang dimana pada saat ini pemerintahan kabupaten Sukabumi dalam upaya peningkatan PAD masih relatif kecil.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi adalah masih rendahnya sumbangan PAD terhadap Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Sukabumi dimana selama periode tahun 2008-2012 sumbangannya relatif masih sangat rendah. Selama periode tersebut sumbangan PAD terhadap Pendapatan Daerah pada APBD belum pernah mencapai angka 10 persen.

Tabel 2
Sumbangan PAD, DAU Terhadap APBD Kabupaten Sukabumi
Tahun 2008-2012

Sumber APBD	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pendapatan Asli Daerah	7,15	5,63	6,48	8,18	9,07
2. Dana Alokasi Umum	82,26	79,76	73,02	67,33	79,34
3. Penerimaan Lainnya	10,59	14,61	20,50	24,49	11,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: Statistik keuangan Provinsi Jawa Barat 2008-2012 (diolah oleh penulis)

Seperti tampak pada Tabel 2, sumbangan DAU terhadap Pendapatan Daerah pada APBD Kabuapten Sukabumi selama periode 2008-2012 masih merupakan yang terbesar diantara sumber Pendapatan APBD lainnya. Sedangkan sumbangan PAD tertinggi hanya 9,07 persen terhadap APBD pada tahun anggaran 2012,

Berdasarkan uraian diatas,. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pendapatan Daerah pada APBD Di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi”** periode 2008-2012.

1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang penting dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dalam program-program pembangunan namun dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki stuktur kontribusi PAD relatif kecil terhadap

total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pembangunan dan pendapatan terbesar justru berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat (DAU), hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah pada APBD di pemerintahan Kabupaten Sukabumi?
2. Seberapa besar kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah pada APBD di pemerintahan Kabupaten Sukabumi?
3. Apakah kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Daerah pada APBD di pemerintahan Kabupaten Sukabumi?

1.3 Maksud, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi mengenai permasalahan yang dibahas “Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pendapatan Daerah pada APBD di pemerintahan Kabupaten Sukabumi”, dan juga untuk menambah pengetahuan penulis mengenai yang didapatkan selama masa perkuliahan dengan realisasi yang ada di lapangan.

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapantan daerah pada APBD di pemerintahan Kabupaten Sukabumi
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Seberapa besar kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapantan daerah pada APBD di pemerintahan Kabupaten Sukabumi
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Daerah pada APBD di pemerintahan Kabupaten Sukabumi

Manfaat penelitian ini berguna untuk :

1. Bagi penulis

Manfaat dilakukannya penelitian bagi penulis, selain untuk menambah pengetahuan penulis khususnya dalam Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pendapatan Daerah pada APBD di pemerintahan Kabupaten Sukabumi, penulis dapat mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah, mengolah data dan informasi tentang masalah tersebut dengan mempergunakan metode ilmiah, serta untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan metodologi penelitin.

2. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap makalah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca khususnya mengenai Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pendapatan Daerah pada APBD di pemerintahan

Kabupaten Sukabumi. Serta makalah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

3. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dapat mempertimbangkan dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai komponen Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pendapatan Daerah pada APBD di pemerintahan Kabupaten Sukabumi dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunannya yang dimana untuk pelayanan publik lebih baik.

1.4 Kerangka Pemikiran

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari :

1. Dana Perimbangan

- a. Bagi hasil pajak dan bukan pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Sumber Daya Alam (SDA)
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- a. Pajak Daerah
 - b. Restribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah sangat bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA ,Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, akan tetapi pemerintah kabupaten sukabumi masih belum bias mengoptimalkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerahnya.

Dana alokasi umum (DAU) menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum (DAU) diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada

daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

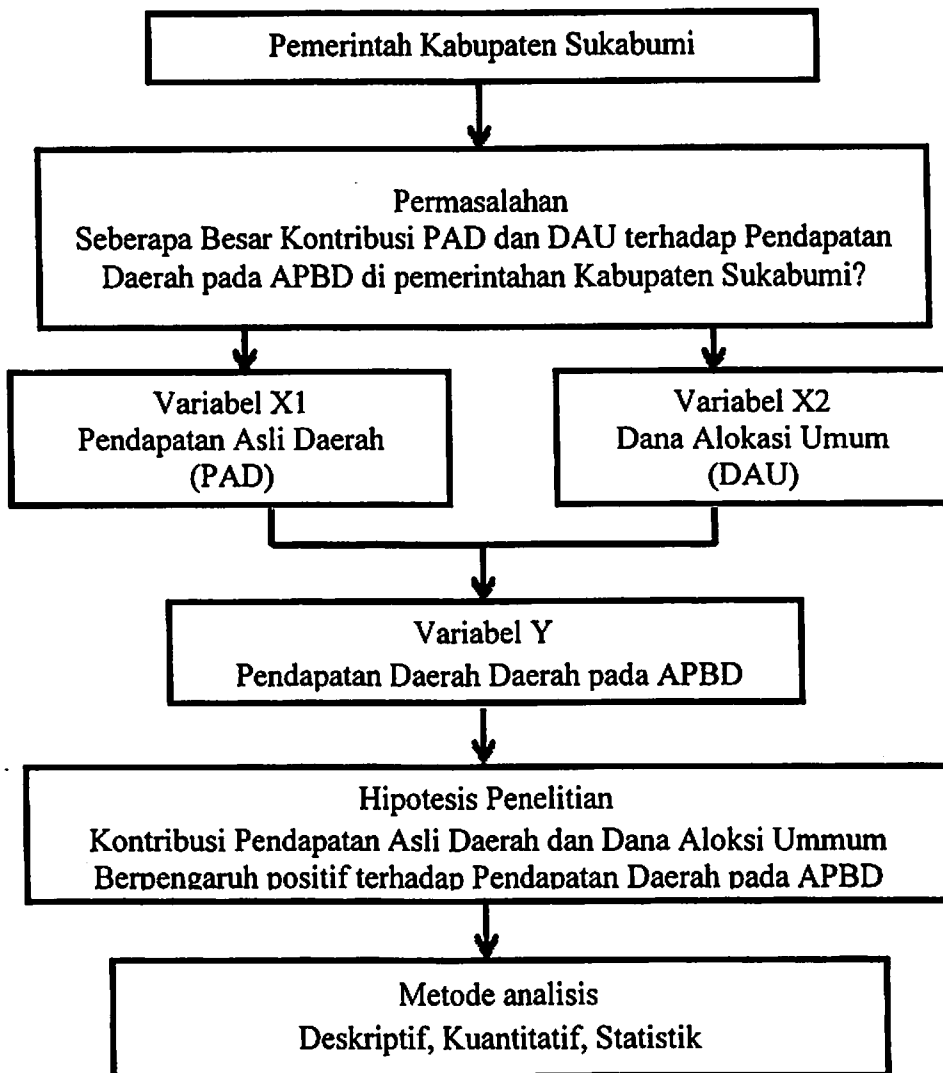
Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang keuangan negara).

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan.

1.5 Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di awal, penulis membuat paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.
Paradigma Penelitian

1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikir yang telah diuraikan maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

H1 : Kontribusi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan daerah pada APBD.

H2 : Kontribusi Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Daerah pada APBD.

H3 : Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pendapatan Daerah pada APBD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan.

Menurut UU No 33 Tahun 2004 , Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain penerimaan yang sah

Peningkatan pendapatan daerah dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Intensifikasi, melalui upaya :
 - a. Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
 - b. Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari
 - c. kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi.
 - d. Mengintensifikasi retribusi daerah yang ada.

e. Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai.

2. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi)

Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sebab pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap Negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memerhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan "Produk Domestik Regional Bruto" daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan "Pendapatan Regional". Kenyataan menunjukkan bahwa

sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki penduduk daerah tersebut dapat ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah.

Meskipun perbedaan tidak berlaku di semua wilayah dengan kekuatan (tingkatan) yang sama, tetapi terdapat aspek-aspek umum yang dapat memberikan beberapa generalisasi penyebab utama perbedaan Pendapatan Daerah:

1. Faktor Geografis.

Apabila suatu wilayah yang sangat luas, distribusi dari sumber daya nasional, sumber energi, sumber daya pertanian, topografi, iklim dan curah hujan tidak akan merata. Apabila faktor-faktor lain sama, maka kondisi geografi yang lebih baik akan menyebabkan suatu wilayah berkembang lebih baik

2. Faktor Historis

Tingkat pembangunan suatu masyarakat juga bergantung pada masa yang lalu untuk menyiapkan masa depan. Bentuk organisasi ekonomi yang hidup di masa lalu menjadi alasan penting yang dihubungkan dengan isu insentif, untuk pekerja dan pengusaha. Sistem feodal memberikan sangat sedikit insentif untuk pekerja keras. Sistem industri dimana pekerja merasa tereksplorasi, bekerja tanpa istirahat, suatu perencanaan dan sistem yang membatasi akan memberi sedikit insentif dan menyebabkan pembangunan terhambat.

3. Faktor Politik

Ketidakstabilan politik dapat menjadi penghambat pembangunan yang sangat kuat. Tidak stabilnya suhu politik sangat memengaruhi perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah. Instabilitas politik akan menyebabkan orang ragu untuk berusaha atau melakukan investasi sehingga kegiatan ekonomi disuatu wilayah tidak akan berkembang. Selain itu, jika pemerintah stabil tapi lemah, korupsi dan ketidakmampuan untuk mengalahkan sikap mementingkan diri sendiri dan menolak tekanan atau kontrol sosial akan menggagalkan tujuan dari kebijakan pembangunan.

4. Faktor Administrasi (birokrasi)

Faktor administrasi yang efisien atau tidak efisien berpengaruh dalam menambah kesenjangan antar wilayah. Saat ini pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan administrator yang jujur, terdidik, terlatih dan efisien karena birokrasi yang efisien akan berhasil dalam pembangunan regional dan sebaliknya.

5. Faktor Sosial

Banyak faktor sosial yang menjadi penghalang dalam pembangunan. Penduduk di wilayah yang belum berkembang tidak memiliki lembaga dan keinginan (*attitude*) yang kondusif untuk pembangunan ekonomi. Di lain pihak penduduk dari wilayah yang lebih maju memiliki kelembagaan dan keinginan yang kondusif untuk pembangunan.

6. Faktor Ekonomi

Penyebab secara ekonomis seperti perbedaan dalam faktor produksi, proses kumulatif dari berbagai faktor, siklus kemiskinan yang buruk, kekuatan pasar yang bebas dan efek "backwash" dan efek menyebar (*spread*) dan pasar tidak sempurna, berlangsung dan menambah perbedaan dalam pembangunan ekonomi.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (13) adalah "pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

PAD ini merupakan sumber penerimaan daerah yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah sendiri berdasarkan potensi, jenis dan tarif pungutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 3, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Herlina Rahman (2005, 38) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan murni daerah. PAD dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu, PAD harus diupayakan agar selalu meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Akan tetapi, secara umum untuk kabupaten/kota, besarnya kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBN sangat bervariasi sesuai potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Menurut Nurcholis (2007, 182), pendapatan asli daerah

adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

2.2.1 Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak ada 11 yaitu:

- a. Pajak Air Tanah
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Hotel
- f. Pajak Restoran
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Hiburan
- i. Pajak Bumi dan Bangunan
- j. Pajak Sarang Burung Walet
- k. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan

Sistem pengenaan pajak :

1. Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak dimana semakin tingginya dasar pajak (*tax base*), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.
2. Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.
3. Pajak regresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walau nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

2.2.2 Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005, 171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balk langsung maupun tidak langsung.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a) Retribusi dipungut oleh daerah;

- b) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah;

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah meliputi pendapatan berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP
4. Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil
5. Retribusi pemakaman
6. Retribusi pelayanan pengabuan mayat
7. Retribusi pelayanan parkir di jalan umum
8. Retribusi pelayanan pasar

9. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
10. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
11. Retribusi penggantian biaya cetak peta
12. Retribusi penggantian kapal perikanan
13. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
14. Retribusi jasa usaha pasar grosir dan pertokoan
15. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
16. Retribusi jasa usaha terminal
17. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
18. Retribusi usaha tempat penginapan/vila
19. Retribusi jasa usaha penyedotan kakus
20. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
21. Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal
22. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga
23. Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air
24. Retribusi jasa usaha pengelolaan limbah cair
25. Retribusi jasa usaha penjualan produk usaha daerah
26. Retribusi izin mendirikan bangunan
27. Retribusi izin tempat minuman beralkohol
28. Retribusi izin gangguan
29. Retribusi izin trayek

2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Undang-undang no 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut

objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititikberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962)

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat

memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada *profit* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjalin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkinkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan. (Josef Kaho Riwu, 2005:188)

2.2.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Hasil usaha daerah lain dan sah adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi dan perusahaan daerah (BUMD). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Menurut Halim (2004,69), lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah

daerah. Menurut Halim (2004,69), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) hasil penjualan asset Daerah yang tidak dipisahkan,
- 2) penerimaan jasa giro,
- 3) penerimaan bunga deposito,
- 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
- 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

2.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dengan terbitnya Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan antara pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi Dana Alokasi Umum ini bersifat Block Grant yang berarti penggunaan dana ini diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dimana dasar hukum pengalokasian dana ini sesuai dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan dana antara pusat dan daerah,

”besaran Dana Alokasi Umum (DAU) ini sekurang-kurangnya 26 % dari pendapatan dalam negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN”.

Dalam pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar.

Fiscal gap terjadi karena karakteristik daerah di Indonesia sangat beraneka ragam. Ada daerah yang dianugerahi kekayaan alam yang sangat melimpah. Ada juga daerah yang sebenarnya tidak memiliki kekayaan alam yang besar namun karena stuktur perekonomian mereka telah tertata dengan baik maka potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi kaya. Namun, banyak juga daerah yang secara alamiah maupun struktur ekonomi masih sangat tertinggal. Untuk itulah maka transfer dari Pemerintahan Pusat dalam bentuk DAU masih diberikan untuk mengatasi kesenjangan antar daerah (*fiscal gap*).

2.3.1 Tahapan Penghitungan DAU

Ada empat tahapan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yaitu:

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas

dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Depkeu c.q. DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

2.4 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan negara).

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan

yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.4.1 Fungsi-Fungsi APBD

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi : anggaran merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja yang bersangkutan
2. Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah Merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

4. Fungsi Alokasi : Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian
5. Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi Stabilisasi : Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

2.4.2 Prinsip-prinsip Anggaran Daerah

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara/ Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

1. Kesatuan : Azas ini menghendaki agar setiap semua APBN/APBD disajikan dalam satu dokumen anggaran
2. Universalitas : Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan di tampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran
3. Tahunan : azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu
4. Spuesialitas : Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disajikan terinci secara jelas
5. Akrual : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima. Walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima kas
6. Kas : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan uang dari/ke kas daerah

2.4.3 Struktur APBD

Berdasarkan undang-undang No. 17 tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah.

Kelompok pendapatan terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.

- b. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kelompok belanja terdiri atas:

- 1) Belanja administrasi umum (belanja tak langsung) adalah belanja yang secara tak langsung dipengaruhi program atau kegiatan.
 - 2) Belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung) adalah belanja yang secara langsung dipengaruhi program atau kegiatan.
 - 3) Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan menambah aset.
 - 4) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja langsung yang digunakan dalam pemberian bantuan berupa uang dengan tidak mengharapkan imbalan.
 - 5) Belanja tak disangka adalah belanja yang langsung dialokasikan untuk kegiatan diluar rencana, seperti terjadinya bencana alam.
- c. Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2.4.4 Penyusunan APBD

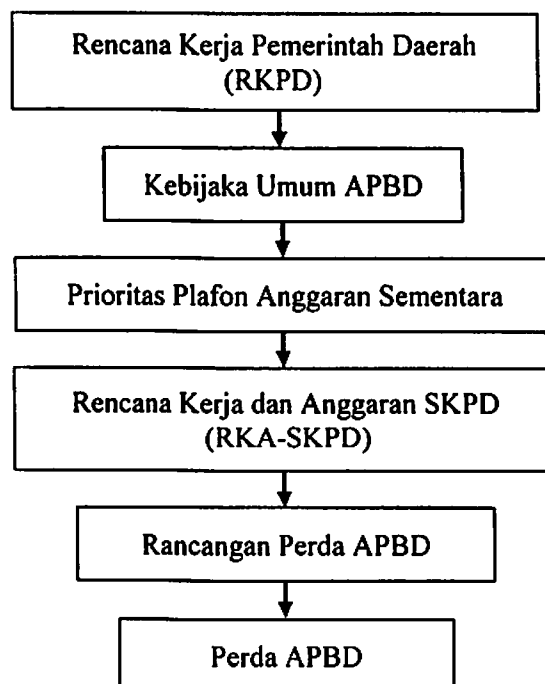
Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

- (1) Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
- (2) penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran;
- (3) penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- (4) penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
- (5) penyusunan rancangan perda APBD; dan
- (6) penetapan APBD.

Dalam gambar, tahapan penyusunan rancangan APBD terlihat sebagai berikut:

Gambar 2

Tahap Penyusunan Rancangan APBD



Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Karena itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan sumber pendanaannya. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai dari dan atas beban APBN
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau desa, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2.4.4.1 Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Karena itu kegiatan pertama dalam penyusunan APBD adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara khusus, kewajiban daerah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

2.4.4.2 Kebijakan Umum APBD

Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, Pemerintah daerah perlu menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri tersebut memuat antara lain:

- a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah
- b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan.
- c. teknis penyusunan APBD
- d. hal-hal khusus lainnya.

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-

program diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan asumsi yang mendasari adalah pertimbangan atas perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam menyusun rancangan KUA, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA yang telah disusun, disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.

Rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

2.4.4.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan.
- b. menentukan urutan program untuk masing masing urusan.
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

KUA serta PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

2.4.4.4 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:

- a. PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan
- b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
- c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
- d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja
- e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKASKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Berdasarkan

pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju tersebut berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, dan terciptanya kesinambungan

RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi tersebut bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

2.4.4.5 Rancangan Perda APBD

Selanjutnya, berdasarkan RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. daftar piutang daerah
- h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. daftar dana cadangan daerah; dan
- m. daftar pinjaman daerah.

Bersamaan dengan penyusunan rancangan Perda APBD, disusun rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan kepala daerah tersebut dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

- a. ringkasan penjabaran APBD;
- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut:

- a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga;
- b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;
- c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Selanjutnya rancangan peraturan daerah tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

2.4.4.6 Perda APBD

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur bagi kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

2.5 Kontribusi PAD dan DAU terhadap Pendapatan Daerah pada APBD

PAD dan DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Kedua sumber pendapatan daerah ini memang sulit untuk dipisahkan. Pemerintah daerah belum tentu mampu mengandalkan PAD-nya sendiri untuk membiayai desentralisasi. Begitu pun dengan pemerintah pusat yang tidak mau sepenuhnya memberikan DAU karena akan menambah ketergantungan daerah kepada pusat.

Kombinasi kedua sumber pendapatan ini, akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi daerah guna meningkatkan Pendapatan Daerah. Semakin tinggi PAD digunakan untuk kebutuhan atau keperluan masyarakat ditambah dengan semakin meningkatnya DAU maka akan meningkatkan Pendapatan daerah tersebut.

APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapasitas dan efektifitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat kordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002). Dalam struktur APBD Terdapat Pendapatan daerah yang dimana semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah.

2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Kontribusi PAD, DAU, dan Pendapatan Daerah, antara lain :

Tabel 3
Hasil Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti	Tahun	Hasil
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kota Tebing Tinggi	Miswar Hakim	2012	Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif dan signifikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Tebing Tinggi
Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Baihaqi	2009	PAD Provinsi Bengkulu

Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu			berpengaruh positif dalam pendapatan daerah
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Besarnya Belanja Pembangunan Daerah “ (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah dan BPKD Kabupaten Pematang)	Susanto	2006	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dari terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Kabupaten Sukabumi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pusat pemerintahan berada di Palabuhanratu. Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Bogor di utara, kabupaten Cianjur di timur, Samudera Hindia di selatan, serta kabupaten Lebak di barat. Kabupaten Sukabumi Terdiri dari 47 kecamatan, 364 desa 3 kelurahan.

Alamat Kantor Pemerintah Kabupaten Sukabumi Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu 43164. Sukabumi Jawa barat Telp. (0266) 433613 Fax. (0266) 433613.

Adapun daftar wilayah dan kecamatan di Kabupaten Sukabumi Adalah:

1. Wilayah Utara
 - a. Kecamatan Cicurug
 - b. Kecamatan Cibadak
 - c. Kecamatan Kalapanunggal
 - d. Kecamatan Parungkuda
 - e. Kecamatan Nagrak
 - f. Kecamatan Caringin
 - g. Kecamatan Cisaat
 - h. Dan lain-lain
2. Wilayah Tengah
 - a. Kecamatan Jampang Tengah

- b. Kecamatan Surade
 - c. Kecamatan Jampang Kulon
 - d. Dan lain-lain
3. Wilayah Selatan
- a. Kecamatan Cisolok
 - b. Kecamatan Simpenan
 - c. Kecamatan Palabuhanratu
 - d. Dan lain-lain

Visi Kabupaten Sukabumi “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Berakhlaq Mulia, Maju, dan Sejahtera”.

Misi Kabupaten Sukabumi adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlaq mulia.
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan berkemampuan memajukan masyarakat.
3. Membangun perekonomian yang tangguh berbasis potensi lokal, dan berwawasan lingkungan Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang masih ada, memanfaatkan peluang, serta menghadapi tantangan untuk mencapai masyarakat kabupaten Sukabumi berakhlaq mulia, maju dan sejahtera.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu cara bagi penulis untuk dapat melakukan penelitian secara baik dan sistematis. Oleh karena itu, membuat desain penelitian sangat penting agar dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau teori.

b. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah explanatory survey, yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel.

c. Teknik Penelitian

Teknik Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Statistik Kuantitatif, yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan terhadap penelitian yang bersifat kuantitatif atau dalam bentuk angka dan bisa diukur serta dihitung.

2. Unit Analisis

Organization dimana sumber data yang unit analisisnya bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sukabumi yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sukabumi serta dari Badan Pusat Statistik Kota Bogor.

3.2.2 Oprasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel penelitian ke dalam dua kelompok yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel Independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi terhadap variabel devenden. Dalam skripsi ini yang menjadi variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

2. Variabel Dependen (Variabel terikat)

Variabel Dependen adalah varibel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam skripsi ini yang menjadi variabel dependen adalah Pendapatan Daerah

Untuk lebih jelasnya kedua variabel tersebut dapat di tuangkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1	Pendapatan Asli Daerah (X1)	a. Pajak daerah	a. Realisasi Pajak Daerah	Rasio
		b. Retribusi daerah	b. Retribusi daerah yang dipungut oleh Kota/Kabupaten	Rasio
		c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	c. Hasil laba perusahaan daerah	Rasio
		d. Lain-lain PAD yang sah	d. Hasil penjualan aset tetap daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rukur rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/pengadaan	Rasio
2	Dana Alokasi Umum (X2)	a. Celah Fiskal	a. Selisih antara Kebutuhan Fiskal dengan Kapasitas Fiskal	Rasio
		b. Alokasi Dasar	b. Total gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.	Rasio
3	Pendapatan Daerah	a. PAD	a. Realisasi Pendapatan	Rasio

		b. Dana Perimbangan	Asli Daerah b. Realisasi Dana Perimbangan	Rasio
		c. Lain-lain penerimaan yang sah	c. Realisasi lain-lain penerimaan yang sah	Rasio

3.2.3 Metode Penarikan Sampel

Sampel dalam penelitian ini di tarik laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten dari tahun 2008-2012, yang terdiri dari 47 Kecamatan dan 364 desa, 3 kelurahan.

3.2.4 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk melengkapi, memenuhi dan menyusun makalah seminar ini melalui beberapa jenis prosedur pengumpulan data dan informasi, yaitu dengan cara:

1. Studi Kepustakaan penelitian dilakukan untuk mendapatkan data dalam bentuk jadi atau dalam bentuk teori dengan cara mempelajari, menelaah, dan meneliti berbagai literatur, seperti buku-buku, catatan diktat perkuliahan, makalah, sumber dari internet, serta data-data lainnya yang yang dapat dijadikan referensi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
2. Studi lapangan secara ini dilakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu pemerintahan kabupaten Sukabumi untuk

memperoleh gambaran dan informasi dari pokok permasalahan yang diteliti. Dalam studi lapangan untuk memperoleh data primer digunakan teknik observasi dan wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang di perlukan. Obsrvasi dilakukan dengan cara melihat dan meneliti laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2008 – 2012.

3.2.5 Metode Analisis.

3.2.5.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda perlu dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi klasik.

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah

dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot*. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance*-nya diatas 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih besar dari 10.

3. Uji Autokorelasi

Uji yang dapat dilakukan dengan menghitung nilai Durbin watson (Dw) dengan membandingkan nilai Dw terhadap dU dan dD. Setelah menghitung nilai d statistik selanjutnya dibandingkan dengan nilai d dari tabel dengan tingkat signifikan 5%.

4. Uji heterokedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residaulnya (SRESID). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat heterokedastisitas. Apabila

dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heterokedastisitas.

3.2.5.2 Uji Hipotesis

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (*multiple regression*), hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini. Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji kontribusi pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pendapatan daerah pada APBD.

Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta \text{ PAD} + \beta \text{ DAU}$$

dimana :

Y	= Pendapatan Daerah
α	= Konstanta
β	= Slope atau koefisien regresi atau intersep
PAD	= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DAU	= Dana Alokasi Umum

Model analisis regresi berguna untuk mengestimasi parameter-parameter regresi untuk membantu menjawab

hipotesis penelitian. Perhitungan estimasi parameter regresi dan uji-uji statistik yang digunakan dalam penelitian didukung dengan program SPSS.

Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F serta koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (*pooled data*) yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta kemampuan model dalam menjelaskan perilaku Pendapatan Daerah dalam APBD. Oleh karena itu pengujian dikelompokkan menjadi:

1. Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta \neq 0$ artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

- a. Jika t hitung $<$ t tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- b. Jika t hitung $>$ t tabel maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

2. Uji Statistik F

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada *level of significant 5%* dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots \beta_k = 0$ artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \beta_k = 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

- a. Jika F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.
- b. Jika F hitung $>$ F tabel maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

3. Uji Koefisien Korelasi (R)

Uji Koefisien Korelasi (R) dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dapat dilihat pada tabel *Model Summary* di kolom R pada hasil regresi di SPSS. Dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

Tabel 5
Model Summary

Rentang Koefisien	Interpretasi
0,00 – 0,20	Sangat Lemah
0,21 – 0,40	Lemah
0,41 – 0,60	Cukup
0,61 – 0,80	Kuat
0,81 – 1,00	Sangat Kuat

4. Uji Koefisien Determinasi (*R-square*)

Tujuan pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat

Hari Jadi Kabupaten Sukabumi diperingati setiap tanggal 1 Oktober yang didasarkan dari titimangsa keberhasilan para pejuang muda Sukabumi setelah merebut paksa kekuasaan transisi Jepang setelah kalah oleh Sekutu tahun 1945. Akibat penolakan tuntutan para pejuang muda Sukabumi tanggal 1 Oktober 1945 melakukan penyerbuan dan berhasil antara lain :

Membebaskan 9 orang tahanan politik, salah seorang di antaranya RA Kosasih yang kemudian sempat menjadi Panglima Kodam Siliwangi.

Perebutan kekuasaan pemerintah sipil, dengan mengganti wedana dan camat yang tidak mendukung aksi pejuang. Jabatan-jabatan di daerah diserahkan kepada para alim ulama.

Pengambilalihan instalasi penting, seperti PLN, Kantor Telepon, Tambang Mas Cikotok, Industri Logam BARATA dan penagambilalihan gudang senjata di Wangun dan Tegal Panjang.

Setelah berhasil merebut kekuasaan dari pemerintah transisi Jepang, para pejuang Sukabumi mengusulkan Mr. Sjamsudin sebagai Walikota Sukabumi dan Mr. Haroen sebagai Bupati Sukabumi. Atas usul tersebut. Residen Bogor mengangkat Mr. Haroen sebagai Bupati pertama Kabupaten Sukabumi di Era Pemerintahan Republik

Indonesia tahun 1946. Sejak saat itu peristilahan yang tertera pada nomenklatur pemerintahan diganti misalnya Ken diganti menjadi Kabupaten, Gun menjadi Kewedanaan (sekarang sudah tidak ada), Son menjadi Kecamatan dan Ku menjadi Desa.

Kekuasaan untuk menetapkan peraturan di Daerah pun mulai disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku secara nasional, seperti perubahan kedudukan Komite Nasional Daerah. Komite yang semula bertugas sebagai pembantu eksekutif, diberi wewenang penuh bersama eksekutif dalam menetapkan peraturan daerah, sejalan dengan peraturan tingkat pusat dan daerah atasan. Belanda berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya, dengan memanfaatkan gerakan pasukan sekutu. Tanggal 9 Desember 1945 pasukan Inggris yang berintikan tentara Ghurka, bersama dengan pasukan Belanda dengan NICA-nya, berusaha masuk ke Sukabumi dan dihadap gabungan pasukan pejuang, maka terjadilah pertempuran sengit, yang dikenal dengan Pertempuran Bojongsokosan. Iring-iringan kendaraan perang tentara Inggris, terdiri dari tank dan panser, diserang pasukan Bojongsokosan, Kecamatan Parungkuda. Kerugian besar diderita pihak sekutu. Disamping beberapa kendaraan perang berhasil diledakkan, banyak tentara Ghurka terbunuh dan beberapa perwira Inggris tewas. Di sekitar situs pertempuran bersejarah itu, sekarang berdiri monumen perjuangan Bojongsokosan. Sejak peristiwa itu, beberapa gerakan

tentara Belanda dan sekutu senantiasa mendapat perlawanan para pejuang muda Sukabumi.

Tanggal 21 Juli 1947, Belanda berhasil lolos masuk ke Sukabumi dan pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi di bawah Mr. Soewardi. untuk sementara dipindahkan ke Nyalindung, sebelah Selatan kota Sukabumi. Belanda membentuk pemerintah sipil dan mengangkat R.A.A. Hilman Djajadiningrat sebagai Bupati Sukabumi, yang kemudian digantikan oleh R.A.A. Soeriadanoeningrat.

Tahun 1950, setelah kekuasaan kembali ke tangan Republik Indonesia, pemerintahan di daerah ditata kembali berdasarkan UU 22/1948. Dengan keluarnya UU 14/1950 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di lingkungan Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Sukabumi menjadi daerah otonom. R.A. Widjasoeria diangkat menjadi Bupati, menggantikan Soeriadanoeningrat. Pada masa pemerintahan. R.A. Widjasoeria, yang berakhir tahun 1958 itu, telah terjadi perubahan-perubahan dalam struktur pemerintahan di daerah yaitu Diundangkannya UU I/1957 menggantikan UU 21/1948. Dengan undang-undang baru ini, Kepala Daerah hanya disertai tugas otonomi daerahnya sendiri, sedang tugas pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri. Terjadi dualisme tugas dan kewenangan di daerah, antara tugas dan kewenangan pusat di daerah.

Tahun 1958, R. Hardjasoetisna diangkat menjadi Kepala Daerah, menjalankan tugas-tugas kewenangan daerah. Sedangkan sebagai pelaksana tugas dan kewenangan pemerintah pusat di daerah dijabat oleh pejabat tinggi yang disebut Pejabat Bupati, saat itu dijabat oleh R.A. Abdoerachman Soeriatanoewidjaja.

UU I/1957 tidak berlangsung lama dengan terbitnya Penpres R.I 6/1959 yang menyerahkan tugas-tugas pusat bidang pemerintahan umum, maupun urusan rumah tangga daerah, ke tangan Bupati/Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Bupati/Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH). R. Koedi Soeradihardja diangkat sebagai Bupati/Kepala Daerah hingga tahun 1967, yang kemudian digantikan oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Haji Anwari.

Perubahan dalam sistem dan struktur pemerintahan daerah turut mewarnai dinamika dan perkembangan daerah serta masyarakat Kabupaten Sukabumi. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 yang menjadi acuan sistem pemerintahan di daerah, pada tahun 1965 diundangkan UU 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini kemudian dicabut sebelum dilaksanakan dan diganti dengan UU 5/1974. Undang-undang baru ini kemudian berlaku selama pemerintahan Orde Baru, hingga diundangkannya UU No. 22/1999 yang sekarang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Haji Anwari merupakan Bupati pertama yang diangkat di masa Orde Baru. Pada masa pemerintahannya, Kabupaten Sukabumi mulai mengembangkan pembangunan infrastruktur, yang mengakhiri isolasi wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. Sebagai Bupati, Haji Anwari berakhir tahun 1978. Bupati berikutnya adalah

- Drs. H.M.A Zaenuddin (1978 - 1983)
- Dr. H. Ragam Santika (1983 - 1989)
- Ir. H. Muhammad (1989 - 1994)
- Drs. H.U. Moch. Muchtar (1994 - 1999)
- Drs. H. Maman Sulaeman (2000 - 2005)
- Drs. H. Sukmawijaya, MM (2005 - 2010)
- Drs. H. Sukmawijaya, MM (2010 - 2015).

4.1.2 Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Visi Kabupaten Sukabumi “**Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Berakhlak Mulia, Maju, dan Sejahtera**”.

Misi Kabupaten Sukabumi adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia.
2. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan berkemampuan memajukan masyarakat.
3. Membangun perekonomian yang tangguh berbasis potensi lokal, dan berwawasan lingkungan Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang masih

ada, memanfaatkan peluang, serta menghadapi tantangan untuk mencapai masyarakat kabupaten Sukabumi beraqlhak mulia, maju dan sejahtera.

4.1.3 Geografis Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi berada di wilayah propinsi jawa barat dengan jarak tempuh 96 km dari ibu kota propinsi jawa barat (bandung) dan 119 km dari ibu kota Negara (Jakarta). Secara geografis Kabupaten Sukabumi terletak diantara $6^{\circ} 57'$ – $7^{\circ} 25'$ lintang selatan dan $106^{\circ} 49'$ – $107^{\circ}00'$ bujur timur dan memepunyai luas daerah 4162 km^2 atau 11,21 persen dari luas jawa Barat atau 3,01 persen dari luas Pulau Jawa, dengan batasan-batasan wilayahnya:

- sebelah utara, berbatasan dengan kabupaten Bogor
- sebelah selatan, berbatasan dengan samudera Indonesia
- sebelah barat, berbatsan dengan kabupaten Lebak dan samudera Indonesia
- sebelah timur, berbatsan dengan kabupaten Cianjur

Selain itu secara administratif kabupaten Sukabumi juga berbatasan langsung dengan wilayah langsung kota Sukabumi yang merupakan daerah kantong dikelilingi beberapa wilayah di kabupaten Sukabumi, kecamatan tersebut yaitu kecamatan Sukabumi di sebelah utara, kecamatan Cisaat dan kecamatan Gunung guruhdi

sebelah barat, kecamatan Nyarindung di sebelah selatan, kecamatan Sukaraja dan kecamatan Kebon pedes di sebelah timur.

Bentuk topografi wilayah Sukabumi pada umumnya meliputi wilayah glombang pada selatan dan bergunung di daerah bagian utara dan tengah. Dengan ketinggian berkisar antara 0-2960 meter. Dengan adanya daerah pantai dan gunung-gunung antara lain gunung salak dan gunung gede yang masing-masing memiliki puncak ketinggian 2211 meter dan 2958 meter menyebabkan keadaan lereng miring (lebih besar dari 35°) meliputi 29 persen dari luar kabupaten Sukabumi. Sementara kemiringan antara (13° - 35°) meliputi 37 persen dan kemiringan antara (2° - 13°) meliputi 21 persen dari luas kabupaten. Sisanya daerah datar meliputi 13 persen dari luas kabupaten. Keadaan topografi yang demikian menyebabkan wilayah Sukabumi menjadi rawan terhadap longsor, erosi tanah, dan lain-lain.

4.1.4 Sumber Daya Alam Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi seperti daerah lain juga mempunyai potensi sumber daya alam salah satunya dalam sektor pertanian, luas sawah yang ditanami di Kabupaten Sukabumi sebagian besar di tanami padi sebanyak 2 kali dalam setahun. Tercatat ada 32.834 hektar sawah yang ditanami 2 kali selama setahun. Kecamatan yang mempunyai lahan terbesar ada di kecamatan surade. Dalam Sub sektor tanam pangan, perkebunan, dan peternakan Kabupaten Sukabumi cukup besar untuk meningkatkan terus potensi SDA nya.

Selain itu sub sektor kehutanan yang dikelola perum perhutani unit III KPH sukabumi adalah sebesar 58.495.53 ha yang terdiri dari hutan produksi 57.828.43 ha. Dan hutan lindung sebesar 667.43 ha. Hutan terluas berada di BKPH lengkong. serta pada sub sektor perikanan jumlah nelayan yang menjadi pelabuhan nusantara palabuhanratu sebagai fishing base ada sekitar 5.112 orang dan kapal/perahu yang digunakan berjumlah 903 buah. Dan jumlah ikan laut yang didapat dari tahun ke tahun semakin bertambah jumlahnya. Adapun potensi geologis Kabupaten Sukabumi yang sudah dimanfaatkan antara lain sumber panas bumi di daerah gunung salak dan cisolok, bahan tambang dan bahan galian emas, perak, batu bara, pasir kwarsa, marmar, pasir besi, bentonit, teras, batu gamping, tanah liat dan lain-lain,

4.1.5 Kondisi Perekonomian Kabupaten Sukabumi

Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, pertumbuhan tersebut dapat diukur melalui besaran dengan besaran pendapatan regional, pendapatan regional bukan hanya dapat berguna untuk menilai perkembangan ekonomi output suatu wilayah dari waktu ke waktu tetapi juga membandingkan dengan wilayah lain.

Dari pendapatan regional di peroleh pertumbuhan perekonomian yang merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Sehingga sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang

sering digunakan sebagai salah satu alat strategi untuk pengambilan kebijakan di bidang ekonomi.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan adalah salah satu indikator pendekatan suatu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indikator yang menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan di daerah tersebut dan laju pertumbuhan tersebut dikenal dengan sebuah Laju Pertumbuhan Perekonomian (LPE). Seiring dengan suasana yang kondusif di tingkat nasional maupun regional pada tahun 2012, laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sukabumi sebesar 4,39 persen mengalami peningkatan di bandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,07 persen. Selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2004 dan 2005 LPE Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan sebesar 3,96 persen dan 4,35 persen. Sedangkan pada tahun 2006-2009 LPE Kabupaten Sukabumi mengalami perlambatan, masing masing 4,12 persen; 3,98 persen; dan 3,65 persen. Kemudian untuk tahun 2010-2012 mengalami kenaikan dari sebesar 4,02 persen; 4,07 persen kemudian 4,34 persen. Hal ini mengindikasikan perekonomian di Kabupaten Sukabumi yang mulai stabil tiga tahun terakhir ini dari beberapa tahun sebelumnya yang tidak stabil karena efek tidak langsung dari krisis global yang terjadi.

Tabel 6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi
Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut sektor

No	Sektor	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pertanian	2,93	3,74	3,11	0,38	0,18
2	Pertambangan & Industri	3,03	2,94	1,27	2,04	1,79
3	Industri Pengolahan	5,05	3,33	4,09	4,92	5,29
4	Listrik, Gas & Air Bersih	5,94	5,80	5,37	4,19	4,37
5	Bangunan/kontruksi	6,47	6,34	8,64	10,57	11,46
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	5,19	4,37	6,35	7,60	8,61
7	Pengangkutan & Komunikasi	4,00	3,57	3,68	7,01	6,977
8	Keuangan, Persewaan & jasa Persewaan	3,73	3,45	3,60	8,00	7,99
9	Jasa-jasa	2,54	2,22	3,11	4,91	4,55
	LPE	3,90	3,65	4,02	4,07	4,34

Tahun 2008-2012 (dalam persen)

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi 2008-2012
 (diolah oleh penulis)

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dirinci persektor dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang pertumbuhan ekonomi secara sektoral tersebut. Apabila LPE Kabupaten Sukabumi di pakai sebagai dasar (base line), maka kinerja sektoral dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi priode tahun yang bersesuaian kelompok kedua sektor yang berhasil mencapai

pertumbuhan positif walaupun masih di bawah LPE total; kelompok ketiga adalah sektor yang mengalami pertumbuhan negatif.

Pertumbuhan sektor yang termasuk kelompok pertama hampir di semua sektor yakni 7 sektor, kecuali pertanian serta pertambangan dan penggalian karena pertumbuhan sektoral melebihi rata-rata laju total LPE. Sedangkan kelompok kedua pertumbuhan sektoral yaitu sektor pertanian dan pertambangan dan penggalian yakni sebesar 0,18 persen dan 1,79 persen. Sedangkan pada kelompok ketiga tidak ada sektor yang mengalami pertumbuhan negatif atau melambat, hal ini berarti di semua sektor pertumbuhan ekonomi semakin menuju ke arah yang lebih baik.

4.1.6 Pemerintahan Kabupaten Sukabumi

Wilayah kabupaten Sukabumi sampai akhir dengan pertengahan tahun 2013 meliputi 47 kecamatan 5 kelurahan dan 381 desa. Sedangkan jumlah sampai akhir tahun 2012 terdapat 3709 rw dan 14205 rt. Saat ini ibu kota Sukabumi berada di kecamatan Pelabuhanratu. Meskipun beberapa kantor pemerintah masih berdomisi di kecamatan Cisaat, kecamatan Cibadak bahkan di wilayah Sukabumi. Menurut hasil pendataan potensi desa terakhir, dari 386 desa dan kelurahan yang ada, wilayah dikategorikan masuk perkotaan sebanyak 67 desa atau kelurahan dan sisa yaitu 319 desa merupakan kategori pedesaan. Dari ke 47 kecamatan yang ada kecamatan Cisaat, Cicurug dan Cisolok memiliki jumlah desa dan kelurahan yang banyak yaitu 13 desa. Sedangkan kecamatan yang

memiliki jumlah desa yang terkecil hanya mempunyai 5 desa dan kelurahan. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan PEMDA Kabupaten Sukabumi pada tahun 2012 sebanyak 15.477 orang yang terdiri dari 9.953 laki-laki dan 5.524 perempuan, jumlah ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4.19 persen. Trend penurunan ini terjadi semenjak tahun 2010.

4.1.7 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten Sukabumi

Luas daerah Kabupaten Sukabumi 4162 km² atau 11,21 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas Pulau Jawa. Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi menurut data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2012 mencapai 2.408.338 jiwa terdiri dari 1.227.409 laki-laki dan 1.180.428 perempuan, yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 104 laki-laki. Kepadatan kabupaten Sukabumi sebesar 579 orang per km². Selain data BPS, data kependudukan juga dilengkapi dengan data hasil registrasi penduduk sebagai pembanding dan pendamping. Dilihat dari kelompok umur, terlihat bahwa penduduk yang berumur 5-9 tahun dan 10-14 tahun merupakan penduduk yang terbanyak. Jumlah keluarga pra sejahtera di kabupaten Sukabumi pada tahun 2012 sebanyak 208.761 Kepala Keluarga (KK), yang terbanyak di Jampang Tengah dan Cibadak dengan jumlah 11.164 dan 11.075 KK.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

Pelaksanaan pembangunan kabupaten Sukabumi dapat direalisasikan berkat adanya dukungan anggaran yang bersumber dari daerah sendiri seperti Pendapatan Asli Daerah dan bersumber dari dana perimbangan yang tertuang dalam Dana Alokasi Umum .

Setelah diolah dengan SPSS selanjutnya secara statistik secara dapat dilihat deskriptif untuk keseluruhan variabel penelitian yang mencakup nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Daerah	10	528221	1856087	1148089.50	496881.593
PAD	10	29804	163476	78400.70	47961.778
DAU	10	418183	1193642	744925.90	256619.492
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Output SPSS Versi 20.0

Dari tabel 7 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 10. Selain itu diperoleh gambaran nilai

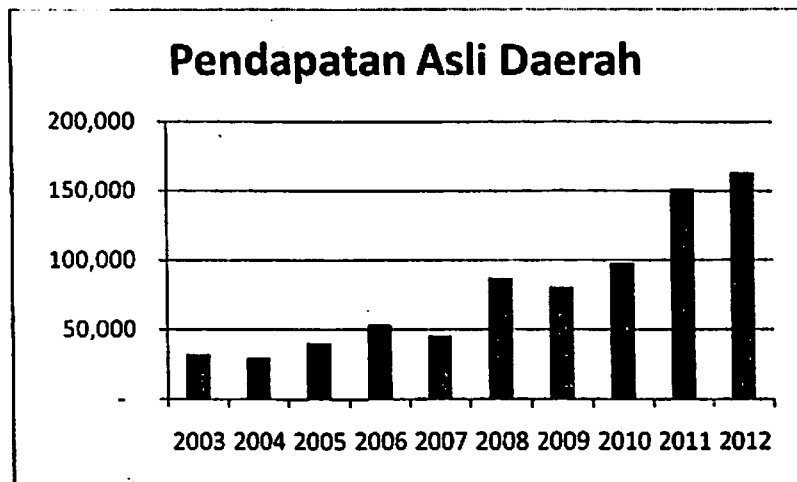
minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi masing-masing variabel dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 8
Realisasi Penerimaan PAD, DAU dan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Tahun	Pendapatan Daerah	Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah
2003	528,221	423,414	32,227
2004	570,634	418,183	29,804
2005	626,160	443,536	40,633
2006	897,128	684,475	53,645
2007	1,025,871	759,685	45,940
2008	1,222,160	827,153	87,402
2009	1,432,336	855,787	80,616
2010	1,519,732	871,927	98,439
2011	1,856,087	971,457	151,825
2012	1,802,566	1,193,642	163,476
Rata-rata	1,148,090	744,926	78,401

Dapat terlihat dalam tabel 8 dan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang terendah yakni sebesar Rp. 29,804 (dalam jutaan) terjadi pada tahun anggaran 2004. Untuk jumlah Pendapatan Asli Daerah terbesar yaitu Rp. 163,476 (dalam jutaan) yang terjadi pada tahun anggaran 2012. Dengan demikian selama periode 2003-2012 rata-rata jumlah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukabumi adalah sebesar Rp. 78,401 (dalam jutaan) dengan standar deviasi sebesar Rp. 47,961.778 (dalam jutaan).

Untuk melihat tingkat Pendapatan Asli Daerah dapat ditunjukkan pula dalam grafik berikut ini:



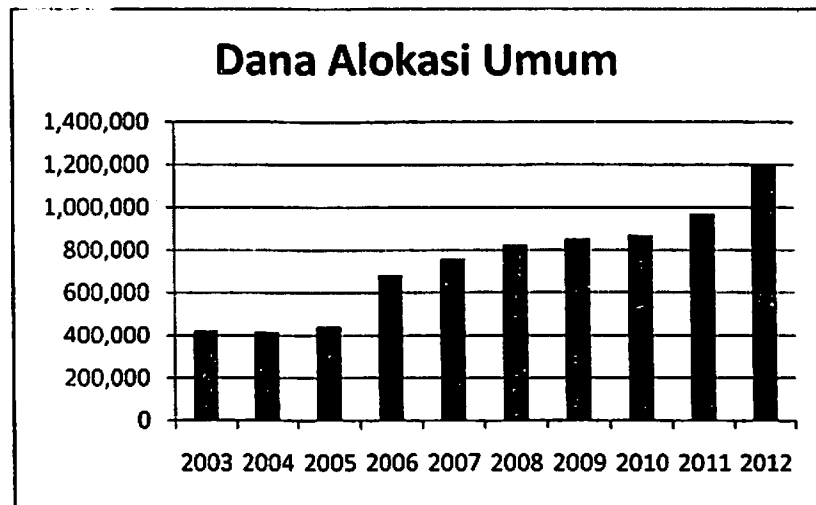
Gambar 3
Grafik Tingkat Penerimaan PAD Pada Kabupaten Sukabumi
Periode 2003-2012

Terlihat dari gambar 3 bahwa pendapatan asli daerah di kabupaten sukabumi tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2004, PAD mengalami penurunan dari Rp 32.227 (dalam jutaan) di tahun 2003, menjadi Rp 29.804 (dalam jutaan) atau mengalami penurunan sebesar 7,5%. Namun, untuk tahun 2005 sampai tahun 2006 PAD mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2009 PAD mengalami penurunan sebesar Rp6,786 (dalam jutaan) atau sebesar 7,8%. Untuk tahun 2010 sampai tahun 2012 PAD mengalami peningkatan.

Dapat terlihat dalam tabel 8 dan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum yang terendah yakni sebesar Rp. 418,183 (dalam jutaan) terjadi pada tahun 2004. Untuk jumlah Dana Alokasi Umum terbesar yaitu Rp. 1,193,642 (dalam

jutaan) yang terjadi pada tahun anggaran 2012. Dengan demikian selama periode 2003-2012 rata-rata jumlah Dana Alokasi Umum di Kabupaten Sukabumi adalah sebesar Rp. 744,926 (dalam jutaan) dengan standar deviasi sebesar Rp. 256.619.492 (dalam jutaan).

Untuk melihat tingkat Dana Alokasi Umum dapat ditunjukkan pula dalam grafik berikut ini:



Gambar 4

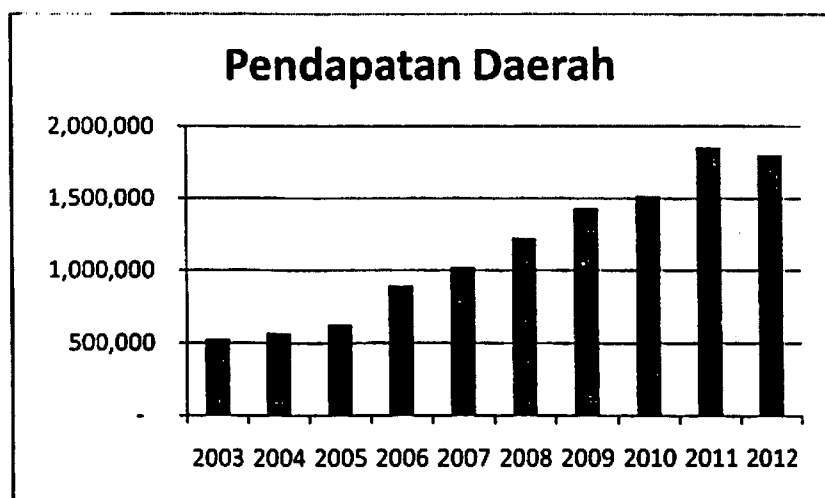
Grafik Tingkat Penerimaan Dana Alokasi Umum Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Periode 2003-2012

Terlihat dari gambar 4 bahwa Dana Alokasi Umum di kabupaten sukabumi terus mengalami peningkatan dari tahun 2003-2012. Pada tahun 2012 Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya (peningkatan sebesar Rp 336,355 dalam jutaan).

Dapat terlihat dalam tabel 8 dan hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah yang terendah yakni sebesar Rp. 528,221 (dalam jutaan) terjadi pada tahun anggaran 2003. Untuk jumlah Pendapatan Daerah terbesar yaitu Rp. 1,856,087

(dalam jutaan) yang terjadi pada tahun anggaran 2011. Dengan demikian selama periode 2003-2012 rata-rata jumlah Pendapatan Daerah di Kabupaten Sukabumi adalah sebesar Rp. 1,148,090 (dalam jutaan) dengan standar deviasi sebesar Rp 496.881.593 (dalam jutaan).

Untuk melihat tingkat Pendapatan Daerah dapat ditunjukkan pula dalam grafik berikut ini:



Gambar 5

Grafik Tingkat Penerimaan Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi Periode 2003-2012

Terlihat dari gambar 5 bahwa pendapatan daerah di kabupaten sukabumi terus mengalami peningkatan dari tahun 2003-2011. Pada tahun 2011 Pendapatan Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya (peningkatan sebesar Rp 336,355 dalam jutaan).

4.2.2 Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak semua data dapat diterapkan pada analisis regresi. Untuk itu diperlukan beberapa pengujian terhadap data diantaranya adalah:

4.2.2.1 Uji Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan program SPSS versi 20.0, dengan hasil uji sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

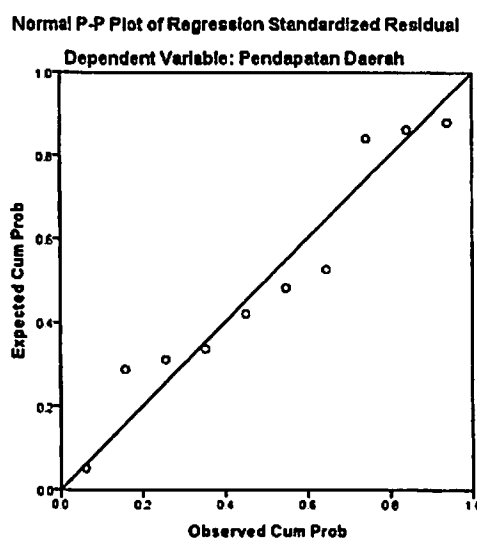
		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Pendapatan Daerah	PAD	DAU	Unstandardized Residual
N		10	10	10	10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1148089.50	78400.70	744925.90	0E-7
	Std. Deviation	496881.593	47961.778	256619.492	116097.929599
Most Extreme Differences	Absolute	.153	.197	.180	.171
	Positive	.153	.197	.180	.169
	Negative	-.116	-.155	-.126	-.171
Kolmogorov-Smirnov Z		.485	.623	.569	.542
Asymp. Sig. (2-tailed)		.973	.832	.903	.930

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS Versi 20.0

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai *kolmogorov-Smirnov* dari seluruh variabel yang diteliti menghasilkan angka sebesar 0.973 untuk variable Pendapatan Daerah, 0.903 untuk variable Dana Alokasi Umum dan 0.832 untuk variabel Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian seluruh nilai *kolmogorov-Smirnov* jauh lebih besar dari 0.05 (5%), dalam hal ini hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang diteliti berdistribusi normal.



Sumber : Output SPSS Versi 20.0

Gambar 6
Grafik Normalitas

Gambar 5 diatas mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdistribusi normal, karena titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

4.2.3.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *tolerance*-nya diatas 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih besar dari 10. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 PAD	.161	6.211
DAU	.161	6.211

a. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

Sumber : Output SPSS Versi 20.0

Berdasarkan nilai *tolerance* dan VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 10 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antar sesama variabel bebas, dimana nilai *tolerance* dari kedua variabel > 0.1 dan nilai VIF dari kedua variabel bebas < 10. Dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas.

4.2.3.5 Uji Autokorelasi

Salah satu syarat dalam menggunakan model regresi yang baik adalah tidak adanya autokorelasi. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai Durbin-Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi.

Tabel 11
Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.972 ^a	.945	.930	131642.678	1.491

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah_a

b. Dependent Variable: Pendapatan Daerah_b

Sumber : Output SPSS Versi 20.0

Dari hasil output seperti pada tabel 11, nilai Durbin-Watson (DW) yang dihasilkan adalah 1.491 sedangkan jika dilihat dari Tabel DW dengan signifikansi sebesar 0.05 (5%) dan jumlah data (N) = 10 serta jumlah variabel independen (k) = 2 diperoleh batas bawah nilai tabel (dL) sebesar 0.6972 dan batas atasnya (dU) sebesar 1.6413. Nilai DW yang dihasilkan adalah sebesar 1.491 nilai tersebut berada diantara 0.6972 dan 1.6413 ($0.6972 < 1.491 < 1.6413$). Hal ini mengandung arti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

4.2.3.6 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terjadi kesamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Jika hal itu terjadi maka dapat disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

Oleh sebab itu diperlukan pengujian heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk melakukan prediksi. Uji yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah uji rank *Spearman* dan menggunakan *scatter plot*. Berikut hasil uji rank *Spearman*:

Tabel 12
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas
Correlations

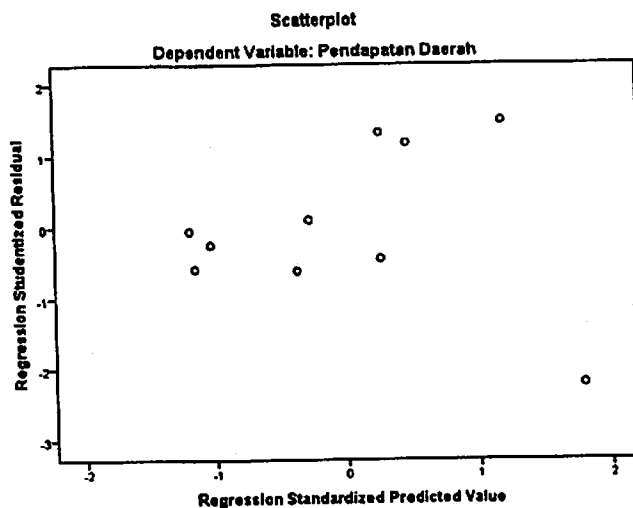
			PAD	DAU	Unstandardized Residual	Abs_Res
Spearman's rho	PAD	Correlation Coefficient	1.000	.976**	.055	.782
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.881	.008
		N	10	10	10	10
	DAU	Correlation Coefficient	.976**	1.000	.188	.794**
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.603	.006
		N	10	10	10	10
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.055	.188	1.000	.042
		Sig. (2-tailed)	.881	.603	.	.907
		N	10	10	10	10
	Abs_Res	Correlation Coefficient	.782**	.794**	.042	1.000
		Sig. (2-tailed)	.008	.006	.907	.
		N	10	10	10	10

** . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber : Output SPSS Versi 20.0

Dari tabel 12 yang merupakan hasil uji rank *Spearman* dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) untuk

PAD sebesar 0.881, dan nilai Sig. (2-tailed) untuk DAU sebesar 0.603, ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas karena nilai Sig. (2-tailed) untuk kedua variabel independen > 0.05 .



Sumber : Output SPSS Versi 20.0

Gambar 7
Grafik Heteroskedastisitas

Grafik diatas mempertegas bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, karena tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

4.2.3 Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap Pendapatan Daerah. Estimasi model regresi linier berganda ini menggunakan

software SPSS 20.0 dan diperoleh hasil output sebagai berikut :

Tabel 13
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
(Constant)	-8812.420	174654.788			-.050	.961
1 PAD	4.530	2.280	.437		1.987	.087
DAU	1.076	.426	.556		2.526	.039

a. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

Sumber : Output SPSS Versi 20.0

Dari tabel 13 diatas dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$Y = -8,812,420 + 4,530PAD + 1,076DAU$$

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar Rp -8,812,420 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah sangat tergantung terhadap nilai PAD dan DAU, sehingga jika nilai PAD dan DAU tidak ada atau nol maka nilai Pendapatan Daerah akan minus. Ada atau tidak adanya PAD dan DAU, Pendapatan Daerah tetap harus ada.
2. Pendapatan asli daerah memiliki koefisien bertanda positif sebesar 4,530, artinya bahwa setiap kenaikan Pendapatan asli daerah satu satuan maka variabel Pendapatan Daerah (Y) akan naik sebesar 4,530 dengan

asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

3. Dana alokasi umum memiliki koefisien bertanda positif sebesar 1,076, artinya bahwa setiap kenaikan Dana alokasi umum satu satuan maka variabel Pendapatan Daerah (Y) akan naik sebesar 1,076 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.2.3.2 Uji Statistik t

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14
Hasil Uji t (Uji Partial)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-8812.420	174654.788		-.050	.961
1 PAD	4.530	2.280	.437	1.987	.000
DAU	1.076	.426	.556	2.526	.000

a. Dependent Variable: Pendapatan Daerah
Sumber : Output SPSS Versi 20.0

Berdasarkan tabel 14, variabel PAD memiliki nilai t-hitung sebesar 1,987 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) sebesar 5% atau sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD di Kabupaten Sukabumi secara signifikan mempengaruhi nilai Pendapatan Daerah di Kabupaten Sukabumi. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H1 **diterima**, yang dapat dinyatakan bahwa Kontribusi PAD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sukabumi.

Sedangkan untuk variabel DAU memiliki nilai t-hitung sebesar 2,526 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) sebesar 5% atau sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU di Kabupaten Sukabumi secara signifikan mempengaruhi nilai Pendapatan Daerah di Kabupaten Sukabumi. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis H2 **diterima**, yang dapat dinyatakan bahwa Kontribusi DAU berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sukabumi.

4.2.3.3 Uji Statistik F

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap Pendapatan Daerah, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS versi 20.0.

Tabel 15
ANOVA untuk Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2100713296248.389	2	1050356648124.195	60.610	.000 ^b
	Residual	121308563316.110	7	17329794759.444		
	Total	2222021859564.500	9			

a. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Sumber : Output SPSS Versi 20.0

Berdasarkan tabel 15 menunjukkan hasil penghitungan regresi dengan nilai F-hitung sebesar 60.610 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas (0,000) yang lebih kecil dari tingkat kesalahan (α) yang ditetapkan yakni 5% atau 0,05 maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan yakni variabel PAD dan variabel DAU secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Daerah di Kabupaten Sukabumi

Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima, yang dapat dikatakan bahwa variabel PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sukabumi.

4.2.3.4 Uji Koefisien Korelasi (R)

Uji Koefisien Korelasi (R) dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen. Hasil uji koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16
Hasil Uji Koefisien Korelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.972 ^a	.945	.930	131642.678	1.491

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD_a

b. Dependent Variable: Pendapatan Daerah_b

Sumber : Output SPSS Versi 20.0

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui bahwa hasil koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,972. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yakni PAD dan DAU berpengaruh sangat kuat terhadap Pendapatan Daerah dipemerintahan Kabupaten Sukabumi.

4.2.3.5 Uji Koefisien Determinasi (*R-square*)

Tujuan pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Hasil uji koefisien determinasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 14 yang menunjukkan nilai-nilai sebagai berikut:

Tabel 17
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.972 ^a	.945	.930	131642.678	1.491

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD_a

b. Dependent Variable: Pendapatan Daerah_b

Sumber : Output SPSS Versi 20.0

Dari tabel 17 dapat diketahui bahwa hasil *adjusted R square* atau R^2 adalah sebesar 0,930 atau 93.0%. Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya Pendapatan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan Variabel DAU 93.0%. Sedangkan sisanya yakni sebesar 7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Daerah Pada APBD di Pemerintahan Kabupaten Sukabumi, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut.

5.1 Kesimpulan

1. Hasil analisis regresi memperlihatkan secara simultan atau bersama-sama kontribusi pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah pada APBD di Kabupaten Sukabumi. Dengan nilai korelasi positif yang berarti jika semakin meningkatnya pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum maka Pendapatan Daerah akan meningkat.
2. Berdasarkan hasil penghitungan nilai statistik uji t secara parsial pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah pada APBD di kabupaten Sukabumi. apabila pendapatan asli daerah mengalami peningkatan maka Pendapatan Daerah akan meningkat.
3. Hasil analisis regresi memperlihatkan antara dana alokasi umum dengan Pendapatan Daerah terdapat hubungan yang berbanding lurus (positif) dimana apabila dana alokasi umum mengalami peningkatan maka Pendapatan Daerah akan meningkat. Hasil penghitungan nilai statistik uji

t secara parsial dana alokasi umum memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sukabumi.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sebaiknya terus meningkatkan PAD, Salah satu cara meningkatkan PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Dan memperbaiki tentang penyempurnaan system pemungutan pajak dan retribusi daerah, jika hal tersebut dilakukan secara konsisten maka upaya peningkatan PAD akan meningkat, Karena PAD merupakan tolak ukur kemandirian daerah. Dengan meningkatnya PAD tersebut maka akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.
2. pemerintah Pusat Sebaiknya memperhatikan lebih detail lagi daerah-daerah yang masih rendah akan pendapatan asli daerahnya, sehingga daerah tersebut mendapat transfer dana alokasi umum dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi sebaiknya mengoptimalkan pengeluaran untuk meningkatkan fasilitas publik dan fasilitas modal yang dapat meningkatkan investasi daerah. Pembangunan infrastruktur akan

berdampak pada peningkatan investasi yang nantinya akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga akan kembali meningkatnya pendapatan daerah.

JADWAL PENELITIAN

No.	Kegiatan	Bulan												
		Juli	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1.	Pengajuan Judul	*	****	*										
2.	Studi Pustaka			***										
3.	Pembuatan Makalah Seminar				****	****								
4.	Seminar						****							
5.	Pengesahan							****	****					
6.	Pengumpulan Data									****				
7.	Pengolahan Data										**			
8.	Penulisan Laporan dan Bimbingan										**	****	****	*
9.	Sidang Skripsi													*
10.	Penyempurnaan Skripsi													**
11.	Pengesahan													

*) Tanda bintang menyatakan satuan unit waktu (minggu)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 3)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistika Kota Bogor. 2013. Laporan Realisasi Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi 2008-2012
- Budidayaukm, 2011. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. <http://budidayaukm.blogspot.com/2011/11/anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah.html?m=0> (diakses 7 Januari 2014)
- DPPKD Kabupaten Sukabumi. 2013. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sukabumi 2010-2011.
- DPR RI. "UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara" . Pasal 15 Ayat 4. Badan Pemeriksaan Keuangan. (Diakses pada 7 Januari 2014)
- Duwi Priyanto. 2011. *Buku Saku analisis Statistik Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Miswar Hakim, 2012. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kota Tebing Tinggi. Skripsi program Sarjana Universitas Negeri Medan.
- Nordiawan, Deddi, Hertianti Ayuningtyas, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi, Putra, Iswahyudi Sondi dan Rahmawati, Maulidah. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang N0. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Selayang Pandang. Visi Misi Kabupaten Sukabumi. <http://www.Sukabumikab.go.id/selayang-pandang/visi-misi> (Diakses 14 November 2013)

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Susanto. 2006. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Besarnya Belanja Pembangunan Daerah “ (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah dan BPKD Kabupaten Pematang). Skripsi Program Sarjana Universitas Widyatama.

Tutorial Kuliah Online. 2013. Cara-cara Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. <http://tutoriaikuliah.blogspot.com/2009/09/cara-cara-untuk-meningkatkan-pendapatan.html> (Diakses 7 Januari 2014)

Wikipedia. 2013. Kecamatan Kabupaten Sukabumi. http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukabumi (Diakses 20 November 2013)

Wikipedia. 2014. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah (Diakses 7 Januari 2014)

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Siliwangi No. 10 Telp. (0266) 433674 Palabuhanratu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070.1/313/KP/2013

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan Surat dari : Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi Nomor :
385/D.1/FE-UP/IX/2013 Tanggal 19 September
2013 Perihal Permohonan Magang/Riset

Menerangkan bahwa :

- a. Nama : **INDRIYANA**
b. Alamat : Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor
c. Untuk menyelenggarakan : Magang/Riset
d. Judul : -
e. Tempat : DPPKAD Kab. Sukabumi
f. Peserta : 1 (Satu) Orang
g. Tanggal/Waktu : 8 s/d 25 Oktober 2013
h. Penanggung Jawab : **Ketut Sunarta, M.M., S.E.. Ak**

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas seperlunya.
3. Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan dengan ketentuan apabila dipergunakan diluar hal tersebut, dinyatakan tidak berlaku.

Palabuhanratu, 27 September 2013

**a.n KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUKABUMI**

Kesatuan Bangsa,

DEDI RISWANDI, SH
NIP. 19550708 199203 1 004

TABEL 1
REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2008-2012 (RIBU RUPIAH)
 Actual Receipt of Province and Regency/Municipality Government In West Jawa 2008-2012 (Thousand Rupiahs)

Jenis Penerimaan <i>Receipt Items</i>	Kabupaten Sukabumi				
	2008	2009	2010	2011	2012 *)
	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
(1)					
A PENDAPATAN DAERAH <i>Local Government Revenue</i>	1,222,160,913.00	1,432,336,420.00	1,519,732,036.00	1,856,087,255.07	1,802,566,204.00
1 Pendapatan Asli Daerah <i>Original Local Government Revenue</i>	87,402,425.00	80,616,079.00	98,439,617.00	151,825,718.34	163,476,799.86
1.1 Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	13,596,929.00	14,681,725.00	15,482,863.00	68,498,881.39	67,735,000.00
1.2 Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	44,817,421.00	46,766,680.00	35,589,584.00	33,270,617.69	19,299,190.00
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	5,852,966.00	4,685,945.00	6,271,075.00	5,199,149.94	6,090,000.00
1.4 Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Government Revenue</i>	23,335,109.00	14,481,729.00	41,086,095.00	44,857,069.32	70,352,609.86
2 Dana Pertimbangan <i>Balanced Budget</i>	1,005,322,262.00	1,142,458,841.00	1,109,743,876.00	1,249,793,326.10	1,430,090,418.14
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Tax Share/Non Taxe/Natural Resources</i>	81,422,812.00	181,645,811.00	141,878,129.00	162,869,248.10	108,181,078.14
2.2 Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	827,153,450.00	855,787,030.00	871,927,247.00	971,457,178.00	1,193,642,550.00
2.3 Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	96,746,000.00	105,026,000.00	95,938,500.00	115,466,900.00	128,286,790.00
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	129,436,226.00	209,261,500.00	311,548,543.00	454,468,210.63	208,998,986.00
B PEMBIAYAAN DAERAH <i>Local Government Financing</i>	102,660,725.00	120,315,331.00	230,781,365.00	127,505,633.58	79,650,000.00
JUMLAH/Total	1,324,821,638.00	1,552,651,751.00	1,750,513,401.00	1,983,592,888.65	1,882,216,204.00

*) Data APBD

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
ACTUAL OF REGENCY/MUNICIPALITY GOVERNMENT RECEIPT
PROVINSI JAWA BARAT
2006 - 2007
(ribu rupiah / thousand rupiahs)

TABEL 2.11.2

Jenis Penerimaan Receipt Items	2006	2007 *)
(1)	(2)	(3)

A. PENDAPATAN DAERAH	897.128.901	1.025.871.540
1. Pendapatan Asli Daerah	53.645.183	45.940.330
1.1. Pajak Daerah	9.845.572	11.022.510
1.2. Retribusi Daerah	29.567.483	25.134.660
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Keayanan Daerah yang Dipisahkan Output of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth	3.254.298	3.500.530
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	10.977.830	6.282.630
Other Local Gov. Original Receipt		
2. Dana Perimbangan	843.483.718	974.931.210
2.1. Bagi Hasil Pajak	44.988.129	44.161.966
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tax Share	11.071.804	12.139.384
2.3. Dana Alokasi Umum Non Tax Share/Natural Resources	684.475.000	759.683.000
2.4. Dana Alokasi Khusus General Allocation Funds	38.050.000	71.667.000
2.5. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi Special Allocation Funds	64.898.785	87.279.860
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Other Receipt	0	5.000.000
B. PEMBIAYAAN DAERAH	51.361.027	49.368.110
LOCAL GOVERNMENT FINANCING		
JUMLAH/TOTAL	948.489.928	1.075.239.650
*) Data APBD		

TABEL 9 1 3 REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2005

Uraian	Jumlah
[1]	[2]
REALISASI	
a. Realisasi Penerimaan Pemerintahan Daerah Otonom	626.160.761.871
i. Pendapatan Asli Daerah	40.633.013.731
1. Pajak Daerah	8.787.705.735
2. Retribusi Daerah	21.477.302.604
3. Bagian Laba Usaha Daerah	2.260.319.208
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	8.107.686.184
ii. Dana Perimbangan	552.760.166.240
1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	53.161.404.089
2. Dana Alokasi Umum	446.400.000.000
3. Dana Alokasi Khusus	-
4. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	53.188.764.151
iii. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	3.277.758.000
b. Realisasi Pengeluaran Pemerintahan Daerah Otonom	612.640.076.006
i. Belanja Aparatur	182.146.285.063
1. Belanja Administrasi Umum	105.110.357.249
a. Belanja Pegawai/Personalia	77.967.151.712
b. Belanja Barang dan Jasa	15.075.803.675
c. Belanja Perjalanan Dinas	2.541.826.000
d. Belanja Pemeliharaan	8.816.770.862
e. Belanja Lain-lain	708.805.000
2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan	55.584.769.896
a. Belanja Pegawai/Personalia	14.748.195.836
b. Belanja Barang dan Jasa	38.608.110.360
c. Belanja Perjalanan Dinas	-
d. Belanja Pemeliharaan	2.228.463.700
3. Belanja Modal	21.450.157.918
ii. Belanja Publik	410.934.496.024
1. Belanja Administrasi Umum	236.791.451.683
a. Belanja Pegawai/Personalia	235.354.003.092
b. Belanja Barang dan Jasa	835.448.601
c. Belanja Perjalanan Dinas	-
d. Belanja Pemeliharaan	601.999.990
2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan	141.845.098.346
a. Belanja Pegawai/Personalia	6.477.023.825
b. Belanja Barang dan Jasa	75.978.517.951
c. Belanja Perjalanan Dinas	-
d. Belanja Pemeliharaan	59.389.556.570
3. Belanja Modal	32.297.945.995
iii. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	19.322.814.919
iv. Belanja Tidak Tersangka	237.480.000

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi

TABEL 9.1.3 : REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2004

Uraian	Jumlah
[1]	[2]
REALISASI	
a. Realisasi Penerimaan Pemerintahan Daerah Otonom	570.934.856.438
i. Pendapatan Asli Daerah	29.804.882.225
1. Pajak Daerah	8.342.078.414
2. Retribusi Daerah	14.567.668.666
3. Bagian Laba Usaha Daerah	1.856.086.804
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.039.048.341
ii. Dana Perimbangan	512.179.499.713
1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	52.818.355.770
2. Dana Alokasi Umum	418.183.000.000
3. Dana Alokasi Khusus	-
4. Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	41.178.143.943
iii. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	28.650.474.500
b. Realisasi Pengeluaran Pemerintahan Daerah Otonom	574.565.207.890
i. Belanja Aparatur	173.145.520.179
1. Belanja Administrasi Umum	104.146.174.497
a. Belanja Pegawai/Personalia	75.544.976.830
b. Belanja Barang dan Jasa	15.389.788.287
c. Belanja Perjalanan Dinas	4.117.653.550
d. Belanja Pemeliharaan	8.131.355.830
e. Belanja Lain-lain	962.400.000
2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan	50.933.224.582
a. Belanja Pegawai/Personalia	12.169.202.651
b. Belanja Barang dan Jasa	38.377.577.931
c. Belanja Perjalanan Dinas	-
d. Belanja Pemeliharaan	386.444.000
3. Belanja Modal	18.066.121.100
ii. Belanja Publik	385.104.254.356
1. Belanja Administrasi Umum	238.592.071.967
a. Belanja Pegawai/Personalia	235.863.333.540
b. Belanja Barang dan Jasa	2.288.839.377
c. Belanja Perjalanan Dinas	-
d. Belanja Pemeliharaan	439.899.050
2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan	124.675.805.890
a. Belanja Pegawai/Personalia	2.154.235.649
b. Belanja Barang dan Jasa	74.746.291.177
c. Belanja Perjalanan Dinas	-
d. Belanja Pemeliharaan	47.775.279.064
3. Belanja Modal	21.836.376.499
iii. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	14.974.653.345
iv. Belanja Tidak Tersangka	1.340.780.000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi

**RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2003**

(Dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
A. TOTAL PENDAPATAN DAERAH	528,221.87
BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	32,227.52
Pos Pajak Daerah	6,813.73
Pos Retribusi Daerah	12,656.23
Pos Laba Perusahaan Milik Daerah	1,484.44
Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11,273.11
DANA PERIMBANGAN	488,044.35
Pos Bagi Hasil Pajak	53,994.16
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	9,635.48
Pos Dana Alokasi Umum	423,414.71
Pos Dana Alokasi Khusus	1,000.00
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	7,950.00
B. TOTAL PEMBIAYAAN	38,846.40
TOTAL	567,068.27

Sumber: situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui internet

Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34081	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07981	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.86388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.86365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.86342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.86320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.86298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.86277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.86256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.86235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.86216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.86196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.86177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.86159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.86140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.86123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.86105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.86088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.86071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.86055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.86039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.86023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.86008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.85993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.85978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.85964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.85950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.85936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.85922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.85909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.85895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.85882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.85870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.85857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.85845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.85833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.85821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.85810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.85798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.85787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.85776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.85765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 121 –160)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
121	0.67652	1.28859	1.65754	1.97976	2.35756	2.61707	3.15895
122	0.67651	1.28853	1.65744	1.97960	2.35730	2.61673	3.15838
123	0.67649	1.28847	1.65734	1.97944	2.35705	2.61639	3.15781
124	0.67647	1.28842	1.65723	1.97928	2.35680	2.61606	3.15726
125	0.67646	1.28836	1.65714	1.97912	2.35655	2.61573	3.15671
126	0.67644	1.28831	1.65704	1.97897	2.35631	2.61541	3.15617
127	0.67643	1.28825	1.65694	1.97882	2.35607	2.61510	3.15565
128	0.67641	1.28820	1.65685	1.97867	2.35583	2.61478	3.15512
129	0.67640	1.28815	1.65675	1.97852	2.35560	2.61448	3.15461
130	0.67638	1.28810	1.65666	1.97838	2.35537	2.61418	3.15411
131	0.67637	1.28805	1.65657	1.97824	2.35515	2.61388	3.15361
132	0.67635	1.28800	1.65648	1.97810	2.35493	2.61359	3.15312
133	0.67634	1.28795	1.65639	1.97796	2.35471	2.61330	3.15264
134	0.67633	1.28790	1.65630	1.97783	2.35450	2.61302	3.15217
135	0.67631	1.28785	1.65622	1.97769	2.35429	2.61274	3.15170
136	0.67630	1.28781	1.65613	1.97756	2.35408	2.61246	3.15124
137	0.67628	1.28776	1.65605	1.97743	2.35387	2.61219	3.15079
138	0.67627	1.28772	1.65597	1.97730	2.35367	2.61193	3.15034
139	0.67626	1.28767	1.65589	1.97718	2.35347	2.61166	3.14990
140	0.67625	1.28763	1.65581	1.97705	2.35328	2.61140	3.14947
141	0.67623	1.28758	1.65573	1.97693	2.35309	2.61115	3.14904
142	0.67622	1.28754	1.65566	1.97681	2.35289	2.61090	3.14862
143	0.67621	1.28750	1.65558	1.97669	2.35271	2.61065	3.14820
144	0.67620	1.28746	1.65550	1.97658	2.35252	2.61040	3.14779
145	0.67619	1.28742	1.65543	1.97646	2.35234	2.61016	3.14739
146	0.67617	1.28738	1.65536	1.97635	2.35216	2.60992	3.14699
147	0.67616	1.28734	1.65529	1.97623	2.35198	2.60969	3.14660
148	0.67615	1.28730	1.65521	1.97612	2.35181	2.60946	3.14621
149	0.67614	1.28726	1.65514	1.97601	2.35163	2.60923	3.14583
150	0.67613	1.28722	1.65508	1.97591	2.35146	2.60900	3.14545
151	0.67612	1.28718	1.65501	1.97580	2.35130	2.60878	3.14508
152	0.67611	1.28715	1.65494	1.97569	2.35113	2.60856	3.14471
153	0.67610	1.28711	1.65487	1.97559	2.35097	2.60834	3.14435
154	0.67609	1.28707	1.65481	1.97549	2.35081	2.60813	3.14400
155	0.67608	1.28704	1.65474	1.97539	2.35065	2.60792	3.14364
156	0.67607	1.28700	1.65468	1.97529	2.35049	2.60771	3.14330
157	0.67606	1.28697	1.65462	1.97519	2.35033	2.60751	3.14295
158	0.67605	1.28693	1.65455	1.97509	2.35018	2.60730	3.14261
159	0.67604	1.28690	1.65449	1.97500	2.35003	2.60710	3.14228
160	0.67603	1.28687	1.65443	1.97490	2.34988	2.60691	3.14195

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi t (df = 161 –200)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
161	0.87602	1.28683	1.65437	1.97481	2.34973	2.60871	3.14162
162	0.87601	1.28680	1.65431	1.97472	2.34959	2.60652	3.14130
163	0.87600	1.28677	1.65426	1.97462	2.34944	2.60633	3.14098
164	0.87599	1.28673	1.65420	1.97453	2.34930	2.60614	3.14067
165	0.87598	1.28670	1.65414	1.97445	2.34916	2.60595	3.14036
166	0.87597	1.28667	1.65408	1.97436	2.34902	2.60577	3.14005
167	0.87596	1.28664	1.65403	1.97427	2.34888	2.60559	3.13975
168	0.87595	1.28661	1.65397	1.97419	2.34875	2.60541	3.13945
169	0.87594	1.28658	1.65392	1.97410	2.34862	2.60523	3.13915
170	0.87594	1.28655	1.65387	1.97402	2.34848	2.60506	3.13886
171	0.87593	1.28652	1.65381	1.97393	2.34835	2.60489	3.13857
172	0.87592	1.28649	1.65376	1.97385	2.34822	2.60471	3.13829
173	0.87591	1.28646	1.65371	1.97377	2.34810	2.60455	3.13801
174	0.87590	1.28644	1.65366	1.97369	2.34797	2.60438	3.13773
175	0.87589	1.28641	1.65361	1.97361	2.34784	2.60421	3.13745
176	0.87589	1.28638	1.65356	1.97353	2.34772	2.60405	3.13718
177	0.87588	1.28635	1.65351	1.97346	2.34760	2.60389	3.13691
178	0.87587	1.28633	1.65346	1.97338	2.34748	2.60373	3.13665
179	0.87586	1.28630	1.65341	1.97331	2.34736	2.60357	3.13638
180	0.87586	1.28627	1.65336	1.97323	2.34724	2.60342	3.13612
181	0.87585	1.28625	1.65332	1.97316	2.34713	2.60326	3.13587
182	0.87584	1.28622	1.65327	1.97308	2.34701	2.60311	3.13561
183	0.87583	1.28619	1.65322	1.97301	2.34690	2.60296	3.13536
184	0.87583	1.28617	1.65318	1.97294	2.34678	2.60281	3.13511
185	0.87582	1.28614	1.65313	1.97287	2.34667	2.60267	3.13487
186	0.87581	1.28612	1.65309	1.97280	2.34656	2.60252	3.13463
187	0.87580	1.28610	1.65304	1.97273	2.34645	2.60238	3.13438
188	0.87580	1.28607	1.65300	1.97266	2.34635	2.60223	3.13415
189	0.87579	1.28605	1.65296	1.97260	2.34624	2.60209	3.13391
190	0.87578	1.28602	1.65291	1.97253	2.34613	2.60195	3.13368
191	0.87578	1.28600	1.65287	1.97246	2.34603	2.60181	3.13345
192	0.87577	1.28598	1.65283	1.97240	2.34593	2.60168	3.13322
193	0.87576	1.28595	1.65279	1.97233	2.34582	2.60154	3.13299
194	0.87576	1.28593	1.65275	1.97227	2.34572	2.60141	3.13277
195	0.87575	1.28591	1.65271	1.97220	2.34562	2.60128	3.13255
196	0.87574	1.28589	1.65267	1.97214	2.34552	2.60115	3.13233
197	0.87574	1.28586	1.65263	1.97208	2.34543	2.60102	3.13212
198	0.87573	1.28584	1.65259	1.97202	2.34533	2.60089	3.13190
199	0.87572	1.28582	1.65255	1.97196	2.34523	2.60076	3.13169
200	0.87572	1.28580	1.65251	1.97190	2.34514	2.60063	3.13148

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74
137	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
138	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
139	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
140	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
141	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.08	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
142	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
143	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
144	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
145	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.86	1.82	1.79	1.76	1.74
146	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.74
147	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
148	3.91	3.06	2.67	2.43	2.28	2.16	2.07	2.00	1.94	1.90	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
149	3.90	3.06	2.67	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
150	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
151	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
152	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.79	1.76	1.73
153	3.90	3.06	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
154	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
155	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.82	1.78	1.76	1.73
156	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
157	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.76	1.73
158	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
159	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
160	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
161	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.16	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
162	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
163	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
164	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	2.00	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
165	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
166	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.07	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
167	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
168	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
169	3.90	3.05	2.66	2.43	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
170	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.94	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
171	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.73
172	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
173	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
174	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
175	3.90	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
176	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
177	3.89	3.05	2.66	2.42	2.27	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
178	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
179	3.89	3.05	2.66	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
180	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
182	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
183	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
184	3.89	3.05	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.81	1.77	1.75	1.72
185	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
186	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.75	1.72
187	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
188	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
189	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
190	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
191	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
192	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
193	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
194	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
195	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
196	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.15	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
197	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
198	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
199	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.99	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
200	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
201	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
202	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
203	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
204	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
205	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
206	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.72
207	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.84	1.80	1.77	1.74	1.71
208	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.05	1.98	1.93	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
209	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
210	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
211	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
212	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
213	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
214	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.88	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
215	3.89	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
216	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
217	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
218	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
219	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.77	1.74	1.71
220	3.88	3.04	2.65	2.41	2.26	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
221	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
222	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
223	3.88	3.04	2.65	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
224	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71
225	3.88	3.04	2.64	2.41	2.25	2.14	2.05	1.98	1.92	1.87	1.83	1.80	1.76	1.74	1.71